

KORELASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN TERHADAP PENINGKATAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCABENCANA DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

F.X. Hermawan Kusumartono

Puslitbang Sosial Ekonomi Budaya dan Peran Masyarakat, Balitbang Dep. PU
Jln. Sapta Taruna Raya 26 Pasar Jumat Jakarta Selatan
Email: fxhermawan@yahoo.com

ABSTRACT

This paper described the relation of public work infrastructures after disaster and the increasing of people welfare in Nangro Aceh Darussalam (NAD) Province. This matter was based on the fact that there was not seen in advance, how much disaster influenced the condition of people's economy. This condition was the main targets as receivers of the benefit. The increasing of people welfare was measured from education, income, job, and possession. This research used the combination of two methods, namely the qualitative and the quantitative methods (Mix Method). The qualitative method was used to answer social factor questions affecting the optimization of the public work infrastructures on the disaster area. The quantitative method was for observing and measuring people's economic condition level that changed then compared with disaster happened before. The research used six sample villages in the NAD Province. The observation found that the public work infrastructures were implemented in rehabilitation and reconstruction stage and it affected on the increasing of people's economy. There were some social problems in the process of planning and implementing stage. This condition caused less optimal public work infrastructures. Therefore, the study suggests that it needs some steps to anticipate against social problems, subsequently public work infrastructures could be well implemented and could increase people welfare.

Keywords: *Public work infrastructure, People welfare, Social problem*

PENDAHULUAN

Gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2004 telah menghilangkan 253.000 jiwa dan menyebabkan kerusakan bangunan fisik yang sangat besar jumlahnya. Bencana itu merusak infrastruktur vital masyarakat, seperti putusnya 80 km jalan di Kota Banda Aceh, termasuk jalan antara Banda Aceh—Kabupaten Meulaboh, merusak 2.349 sekolah dan 140.000 rumah di Aceh. Kerusakan infrastruktur itu juga berimplikasi pada matinya rantai kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal tersebut mendorong kebutuhan akan suatu proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperbaiki segenap infrastruktur fisik dan

perlahan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurut data Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh, hingga awal tahun 2007 telah diselesaikan pembangunan infrastruktur sekitar 60% dari hasil yang ditargetkan. Di seluruh wilayah Provinsi NAD yang terkena gempa bumi dan tsunami, total 70.000 rumah permanen sudah terbangun dari 120.000 yang ditargetkan, 121 jembatan, dan 1.201 km jalan sudah dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, sebanyak 747 gedung sekolah sudah dapat berfungsi kembali (BRR, 2006: 5).¹ Berbagai program yang dilaksanakan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara kasat mata dapat dikatakan telah berhasil menata wajah

infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial di Aceh. Meskipun di sisi lain juga harus diakui bahwa pencapaian itu juga belum optimal karena berbagai kendala struktural maupun kultural.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dinilai masih jauh dari memadai dan mengundang ketidakpuasan. Berbagai permasalahan muncul ke permukaan berkaitan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dapat dimaklumi jika hasil *polling* yang dilakukan Harian Kompas, sebagian besar responden warga Aceh (60%) belum merasa puas dengan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi sarana dan fasilitas fisik seperti permukiman dan infrastruktur perhubungan (Kompas, 24 November 2006).

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum (ke-PU-an) menjadi sangat penting dalam tahap rekonstruksi di Provinsi NAD. Yang dimaksud pembangunan ke-PU-an adalah prasarana jalan, jembatan, pengairan, perumahan, dan permukiman. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada prasarana jalan dan perumahan. Tujuannya sangat jelas, yaitu memulihkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, yang sering kali menjadi pertanyaan adalah sejauh mana pembangunan infrastruktur ke-PU-an telah meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pascabencana? (Puslitbang Sebranmas, 2007: I-5).² Evaluasi mengenai pembangunan infrastruktur ke-PU-an memang sudah dilakukan, hanya saja belum dilihat seberapa besar pengaruhnya pada kondisi ekonomi penduduk yang menjadi sasaran utama penerima manfaatnya. Biasanya pemaparan mengenai peningkatan kondisi ekonomi penduduk dilakukan secara umum atau hanya berupa paparan kata-kata yang kurang terukur. Oleh karena itu, dalam studi ini diukur hubungan tersebut, juga dilihat faktor-faktor sosial yang menghambat pembangunan infrastruktur ke-PU-an.

PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan yang ada, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Seberapa besar hubungan pembangunan infrastruktur ke-PU-an dengan kondisi ekonomi masyarakat pascabencana di Provinsi NAD
2. Apa saja faktor sosial (struktural maupun kultural) yang menghambat pembangunan ke-

PU-an di wilayah yang dilanda bencana tsunami di Provinsi NAD.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang mendasari dilakukannya studi ini, adalah statika dan dinamika sosial masyarakat (*social static and dynamic*) dan status sosial ekonomi (SSE).

Statika dan Dinamika Sosial Masyarakat

Konsep statika dan dinamika sosial merupakan konsep dasar dalam mengkaji aspek sosial kemasyarakatan. Faktor sosial budaya, baik aspek struktural maupun kultural akan ditinjau dengan menggunakan kerangka aspek statika dan dinamika sosial ini.

Masyarakat terdiri atas bagian yang statis dan dinamis. Statika sosial berkaitan dengan struktur-struktur yang ada dalam suatu masyarakat, sedangkan dinamika berkaitan dengan interaksi antara bagian-bagian dari struktur yang bekerja satu sama lain secara dinamis. Bagian-bagian dalam masyarakat tersebut berinteraksi sebagai suatu sistem yang bekerja terus-menerus secara dinamis dalam masyarakat (Munandar, 2006: 39).

Konsep statika dan dinamika sosial sangat relevan dalam kegiatan ini sebagai *theoretical framework* dalam melihat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan ke-PU-an dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor-faktor seperti kurang optimalnya mekanisme kerja BRR, ketiadaan peran lembaga adat dapat dikategorikan sebagai kondisi statika sosial yang memengaruhi pembangunan ke-PU-an. Faktor-faktor lain seperti interaksi antara masyarakat lokal dengan pendatang, antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat dapat dikategorikan sebagai aspek dinamika sosial yang memengaruhi pembangunan ke-PU-an dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan kedua konsep ini dapat memudahkan kategorisasi temuan lapangan, analisis permasalahan, serta titik tolak perumusan rekomendasi.

STATUS SOSIAL EKONOMI

Konsep status sosial ekonomi berkaitan erat dengan sistem pelapisan di dalam masyarakat. Soleman mendefinisikan status sebagai posisi

seseorang dalam suatu kelompok sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut (Soleman, 1987:57).³ Sementara yang dimaksud dengan status sosial ekonomi ialah tempat atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, serta hak dan kewajibannya (Soekanto, 1982: 233).⁴

Terdapat berbagai jenis operasionalisasi yang dapat digunakan untuk menentukan posisi seseorang dalam stratifikasi sosial. Parelius (1982: 265)⁵ menyatakan bahwa: "Status sosial ekonomi atau kelas sosial dapat diukur dalam beberapa cara. Yang biasa diukur adalah pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan kepemilikan".

Merujuk pendapat Parelius tersebut, status sosial ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek. Pada umumnya terindikasi dari pendidikan dan/atau pekerjaan, dan/atau penghasilan serta kepemilikan seseorang, baik secara terpisah ataupun bersama-sama. Apabila unit analisis kita rumah tangga, maka yang kerap digunakan sebagai patokan adalah pendidikan, pekerjaan, penghasilan, serta kepemilikan keluarga. Dalam hal ini dimensi konsep status sosial ekonomi yang akan diukur adalah pendidikan, penghasilan, pekerjaan, dan kepemilikan.

Konsep Status Sosial Ekonomi (SSE) yang merujuk pada keempat aspek atau salah satu dari aspek di atas dapat menjadi alat bantu yang akan memudahkan peneliti untuk dapat membedakan (memetakan) kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah penelitian, di mana salah satu kepentingan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan setelah tsunami berhubungan dengan pembangunan ke-PU-an yang dilakukan.

Indikator-indikator di atas sebenarnya hampir sama dengan dimensi dan indikator yang dikembangkan oleh BPS untuk mengukur tingkat ekonomi penduduk. Hanya saja, demi relevansi kajian dengan sektor ke-PU-an, pengukuran variabel kondisi ekonomi dibuat lebih sederhana berdasarkan empat dimensi di atas.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui hubungan pembangunan infrastruktur ke-PU-an dengan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat pascabencana di Provinsi NAD.

2. Mengetahui faktor-faktor sosial (struktural maupun kultural) yang menghambat pembangunan ke-PU-an di wilayah bencana tsunami di Provinsi NAD.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan gabungan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif, atau dikenal dengan *mixed method*. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan faktor sosial yang memengaruhi optimalisasi pembangunan ke-PU-an di daerah bencana. Merujuk pada pemaknaan dan datanya yang bersifat sangat kualitatif sehingga tidak memungkinkan untuk digali menggunakan metode kuantitatif. (Babbie, 1995: 33).⁶ Pendekatan kualitatif yang menekankan pada manfaat dan pengumpulan informasi digunakan dalam mendalami fenomena yang diteliti (Koenjaraningrat, 1984: 94).⁷ Penggunaan metode kuantitatif dalam melihat atau mengukur tingkat kondisi ekonomi masyarakat berubah dibandingkan sebelum bencana. Metode kuantitatif di sini dapat memberikan gambaran berupa pola umum dari kondisi ekonomi masyarakat serta hubungan antara pembangunan ke-PU-an dengan kondisi ekonomi.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Tan (1993: 54)⁸, tulisan deskriptif merupakan tulisan yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat karena memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi pascabencana.

Penarikan sampel dilakukan dengan teknik nonprobabilita di mana tidak semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Untuk menentukan desa/gampong yang menjadi sampel, secara purposif tim peneliti memilih masing-masing dua desa dari setiap kabupaten berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam rencana kajian, yakni desa yang mengalami kerusakan infrastruktur yang parah akibat gempa bumi dan tsunami. Penentuan siapa saja yang melakukan pengisian kuesioner dilakukan secara *random accidental sampling*. Jumlah total responden dalam penelitian ini adalah 263 orang yang terbagi atas 45 responden dari Desa Gampong Pande (Kec. Kuta Raja), 46 dari Desa

Lamjabat (Kec. Meuraxa); 31 dari Desa Lambadeuk (Kec. Mesdjid Raya), 48 responden dari Desa Labuy (Kec. Longh), 48 dari Desa Kuala Meuresi (Kec. Theunom), dan 45 dari Desa Janggeut (Kec. Jaya)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) observasi, dengan menggunakan instrumen pedoman observasi; 2) wawancara mendalam, dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara mendalam; 3) *focus Group Discussion* (FGD) dengan menggunakan pedoman FGD; dan 4) wawancara terstruktur, dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni–Juli 2007 di tiga lokasi, yakni Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). Dipilihnya lokasi tersebut didasari oleh karakteristik wilayah studi dibandingkan antara urban area/perkotaan (Banda Aceh), rural urban area/daerah satelit (Aceh Besar), dan rural area/pedesaan (Aceh Jaya) (USAID, 2006: 24).⁹

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

- Pengolahan dan analisis data kualitatif menggunakan empat tahap, yaitu: a) tahap identifikasi, b) tahap kategorisasi, c) tahap interpretasi, d) tahap penarikan kesimpulan (Moleong, 2000 : 190–214).¹⁰
- Pengolahan dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji statistik

univariat dengan *paired sample 't' test* untuk melihat *gap* kondisi sosial ekonomi masyarakat (sesaat setelah tsunami dan saat ini) dan untuk uji hubungan bivariat akan digunakan uji somers'd untuk melihat kekuatan dan arah hubungan serta signifikansi hubungan antara pembangunan ke-PU-an dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Kemajuan Pembangunan Ke-PU-an di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam

Kemajuan pembangunan ke-PU-an di wilayah penelitian hingga bulan desember 2006 dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 terlihat betapa besar investasi yang telah ditanamkan di daerah bencana, khususnya untuk prasarana ke-PU-an. Harapannya adalah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi segera selesai sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh kembali seperti sediakala. Dengan investasi yang telah ditanamkan tersebut, pertanyaan yang muncul adalah apakah pembangunan ke-PU-an tersebut cukup memadai?.

Berikut pendapat masyarakat mengenai pembangunan ke-PU-an di gampong mereka. Berikut petikan wawancara dengan beberapa informan, seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Kemajuan Pembangunan Ke-PU-an di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Hingga Desember 2006)

Bidang	Kerusakan/ Kebutuhan	Oktober 2005	April 2006	Desember 2006
Perumahan	120.000 unit	10.119 unit	41.734	51.682
Jembatan	120 buah	-	41 buah	121 buah
Jalan	3.000 Km	-	490 Km	1.201 Km
Sekolah	2.006 unit	132 unit	524 unit	747 unit
Fasilitas Ibadah	11.536 unit	141 unit	489 unit	563 unit
Fasilitas Kesehatan	127 unit	38 unit	113 unit	324 unit
Sawah dan Kebun	60.000 ha	30.926 ha	37.926 ha	48.830 ha
Tambak	27.593 ha	19.299 ha (pembersihan)	9.258 ha (proses rehab)	6.800 ha (selesai)
Kapal Nelayan	Tidak terdata	4.379 buah	6.160 buah	-
Pelabuhan Laut	14 Pelabuhan	5 (proses rehabilitasi)	2 (selesai) 3 (dlm proses)	7 (selesai)
Pelabuhan Udara	11 bandara/ Air strip	2 bandara	5 bandara/ air strip	7 (selesai)

Sumber: Laporan BRR Tahun 2006

Pada Tabel 2 terlihat bahwa masyarakat menilai bahwa yang paling tidak memadai adalah kuantitas dan kualitas rumah sebesar 65,8% dan 76,8%. Kondisi ini beralasan karena rumah adalah hal utama bagi masyarakat setelah terjadinya tsunami.

Perkembangan Tingkat Ekonomi Masyarakat (Diukur Berdasarkan Tingkat Ekonomi Keluarga)

Perlu menjadi catatan bahwa penelitian ini melihat tingkat pertumbuhan ekonomi pada level ekonomi keluarga dan bukan pada tingkat

Tabel 2. Pendapat Masyarakat Mengenai Pembangunan ke-PU-an

	Tidak Memadai	Cukup Memadai	Sangat Memadai	Komentar Informan
Kuantitas Rumah	65,8%	31,9%	2,3%	Yah...kalau dibilang cukup, mungkin tidak pernah akan cukup. Tapi memang masih banyak kurangnya pembangunan rumah di gampong kami ini. Dari 183 KK yang sebenarnya membutuhkan, sekarang baru disediakan 133 unit. Masih banyak yang belum dapat dan masih numpang di rumah saudara. Itu kan dari pencatatan kebutuhannya yang juga kurang beres, masyarakat kurang kerja sama, jadi waktu catatan itu sudah masuk dan turun bantuan baru sebagian masyarakat yang lain komentar dan mendaftar. ¹
Kualitas Rumah	76,8%	23,2%	0,0%	Pembangunan rumah di sini kekurangannya adalah dapur. Terus masih banyak yang belum dapat. Dapurnya juga belum dibuat, cuma mejanya saja. Jadi kalau kami masak itu macam masak-masak. Apalagi musim angin barat kayak gini, habis minyak kompor, habis gas. Kalau kualitasnya sih sebenarnya juga kurang bagus. Rumahnya pada miring dan lepas semua. Keramiknya benjolan ha...ha.. ²
Kuantitas Jalan	41,4%	47,9%	10,6%	Jalan cukup banyak yang hilang, sebagian besar sudah kita bangun, tetapi dengan menggunakan bantuan program P2KP, jalan dasar sudah hilang, sudah kita bangun kembali. Tanah itu kita buat jalan tani, jalan yang ke gunung. ..jumlah jalan sudah cukup lah, kalau jalan setapak cukup, jalan lorong itu lain. Kira-kira 70% jalan sudah tersedia, termasuk jalan ke desa-desa lain. Kalau secara jumlah cukup lah...walau masih ada beberapa yang harus ditambahkan. ³
Kualitas Jalan	64,3%	28,9%	6,8%	Memang yang dikejar kontraktor dan BRR kan jumlahnya dulu, kualitasnya yang kurang diperhatikan. Coa lihat jalan ini (sambil menunjuk jalan di depan rumahnya) kan sayang kalau asal ada tapi nanti cepet rusak. Masyarakat tahunya memakai saja, kalau baru dibangun saja seperti ini, bagaimana kalau sudah lama nanti, jangan-jangan merepotkan masyarakat di sini. ⁴

¹ Wawancara dengan informan FN, di kedai kopi desa Gampong Pande, Kamis 28 Juni 2007

² Wawancara dengan Keuchik Gampong Pande, Selasa 26 Juni 2007

³ Wawancara dengan Keuchik Janggeut, Rabu, 27 Juni 2007

⁴ Wawancara dengan informan RB, Kamis 28 Juni 2007

ekonomi regional. Hal ini didasarkan pada hubungan pembangunan ke-PU-an dengan ekonomi regional yang cukup banyak diganggu oleh variabel kontrol lain yang disinyalir turut memengaruhi ekonomi regional tersebut. Artinya, boleh jadi hubungan antara pembangunan ke-PU-an secara langsung dengan ekonomi regional sangat kecil dibandingkan pengaruhnya pada ekonomi keluarga. Berikut disajikan perbandingan tingkat ekonomi keluarga di lokasi penelitian 6 bulan–1 tahun pascatsunami dan saat ini, seperti terlihat pada Tabel 3 dan Gambar 1.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan ekonomi penduduk sejak periode 6 bulan–1 tahun pascatsunami hingga saat penelitian ini dilakukan. Peningkatan tersebut terindikasi dari penurunan persentase penduduk dengan tingkat ekonomi rendah dari 88,6% menjadi 41,4% saat penelitian ini dilaksanakan atau berkurang sebesar 47,2%. Penduduk dengan tingkat ekonomi sedang mengalami kenaikan sebesar 34,2%. Untuk tingkat ekonomi tinggi, persentase responden yang menempati kategori tersebut meningkat sebesar 12,9% dari angka 1,5% awal setelah tsunami hingga mencapai 14,4% saat ini.

Adapun perbandingan tingkat ekonomi keluarga masyarakat Aceh di lokasi penelitian sebelum terjadinya tsunami dan saat ini, dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 2.

Pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa tingkat ekonomi penduduk saat ini belum pulih atau kembali ke kondisi normalnya. Hal tersebut terbukti dari kesenjangan (*gap*) persentase penduduk pada tingkatan ekonomi tertentu. Saat ini responden yang tergolong pada kategori tingkat ekonomi rendah jumlahnya masih cukup tinggi yakni mencapai 41,4%, kondisi ini terpaut 23,9% dari persentase responden yang menempati tingkatan ekonomi tersebut sebelum terjadi gempa bumi dan tsunami di NAD yang saat itu hanya sejumlah 17,5%. Angka kesenjangan tersebut merefleksikan masih cukup banyak penduduk yang belum kembali ke kondisi ekonomi semula karena belum bekerja, belum memiliki penghasilan, dan sebagainya, sehingga masih berkuat pada tingkat ekonomi yang rendah.

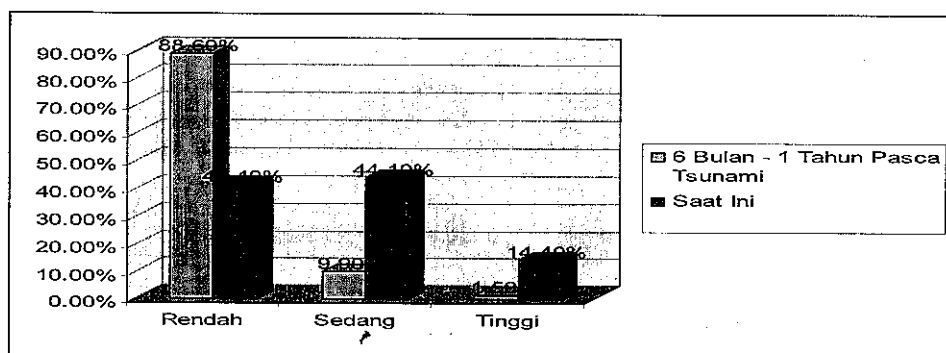
Responden dengan tingkat ekonomi menengah saat ini jumlahnya 44,1%, sedangkan sebelum tsunami mencapai 48,3%. Selisih (*gap*) responden dengan tingkat ekonomi menengah di

Tabel 3. Peningkatan Ekonomi Keluarga pada Masyarakat Aceh di Lokasi Penelitian 6 bulan–1 tahun dan Saat Ini

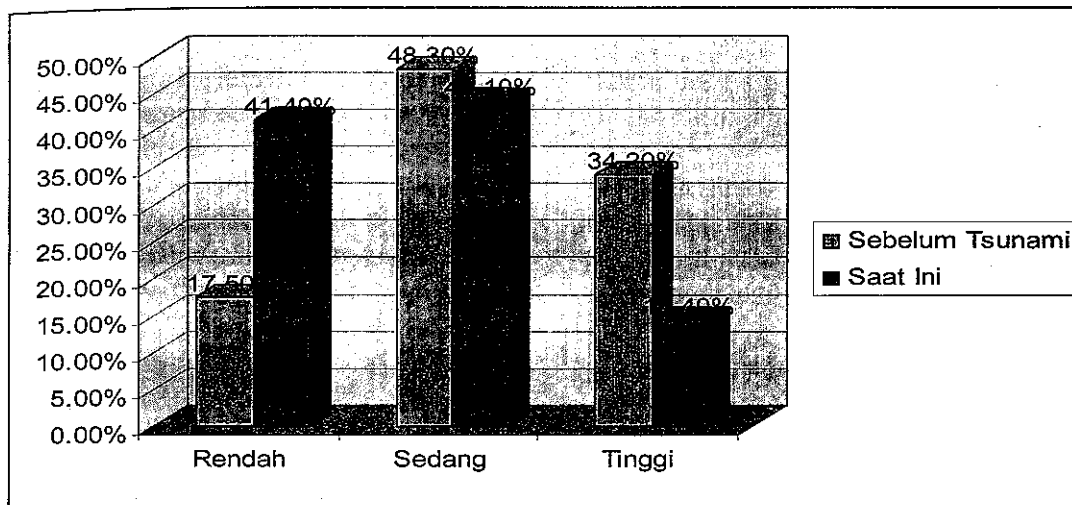
Tingkat Ekonomi	6 bulan–1 tahun pasca Tsunami (%)	Saat Ini (%)	Gap (%)
Rendah	88,6	41,4	47,2
Menengah	9,9	44,1	32,4
Tinggi	1,5	14,4	12,9

Tabel 4. Peningkatan Ekonomi Keluarga pada Masyarakat Aceh di Lokasi Penelitian Sebelum Tsunami dan Saat Ini

Tingkat Ekonomi	Sebelum Tsunami (%)	Saat Ini (%)	Gap (%)
Rendah	17,5	41,4	23,9
Menengah	48,3	44,1	4,2
Tinggi	34,2	14,4	29,8



Gambar 1. Peningkatan ekonomi keluarga pada masyarakat Aceh di lokasi penelitian 6 bulan–1 tahun dan saat ini



Gambar 2. Peningkatan ekonomi keluarga pada masyarakat Aceh di lokasi penelitian sebelum tsunami dan saat ini

dua periode tersebut mencapai 4,2%, yang artinya kondisi ekonomi masyarakat belum kembali ke titik semula seperti sebelum tsunami. Untuk responden dengan tingkat ekonomi tinggi sebelum tsunami persentasenya mencapai 34,2%, terpaut 29,8% dari persentase untuk hal yang sama saat ini yang hanya sejumlah 14,4%.

HUBUNGAN ANTARA PEMBANGUNAN KE-PU-AN DENGAN PENINGKATAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT

Pembangunan ke-PU-an terhadap kondisi ekonomi masyarakat, di mana pembangunan ke-PU-an merupakan gabungan skor dari pembangunan perumahan dan jalan, diperlihatkan seperti pada Tabel 5.

Pada Tabel 5 terlihat bahwa untuk pembangunan ke-PU-an yang masih tergolong rendah atau kurang baik, mayoritas masyarakatnya masih berada pada kondisi ekonomi yang rendah pula, yakni mencapai 91,7%. Untuk pembangunan ke-PU-an di desa mereka dan sekitarnya sudah tergolong sedang, paling banyak responden juga memiliki tingkat ekonomi keluarga yang sedang pula yakni 51,7%. Sementara untuk tingkat pembangunan ke-PU-an yang tinggi atau sudah sangat memadai, paling banyak juga memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat menjadi tinggi pula, di mana dalam kondisi tersebut masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang tinggi pula, yakni sebesar 31,6%.

Tabel 5. Tabulasi Silang Pembangunan ke-PU-an dengan Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Crosstab

			Kondisi Ekonomi Responden Saat ini			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Pembangunan Ke-PU-an Di Desa dan Sekitarnya (Lingkup Kab/Kota)	Rendah	Count	100	49	13	162
		% within Kondisi Ekonomi Responden Saat ini	91.7%	42.2%	34.2%	61.6%
	Sedang	Count	8	60	13	81
		% within Kondisi Ekonomi Responden Saat ini	7.3%	51.7%	34.2%	30.8%
	Tinggi	Count	1	7	12	20
		% within Kondisi Ekonomi Responden Saat ini	.9%	6.0%	31.6%	7.6%
Total	Count	109	116	38	263	
	% within Kondisi Ekonomi Responden Saat ini	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Adapun kekuatan hubungan antara pembangunan ke-PU-an dengan kondisi ekonomi masyarakat dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 6.

Kekuatan hubungan antara pembangunan infrastruktur ke-PU-an di desa dan sekitarnya terhadap kondisi ekonomi responden mencapai 0,458 atau tergolong memiliki hubungan yang cukup kuat dan positif/berbanding lurus. Artinya, pembangunan ke-PU-an di desa dan sekitarnya cukup kuat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan hubungan positif berarti. Semakin tinggi pembangunan ke-PU-an di desa dan sekitarnya akan semakin tinggi pula kondisi ekonomi masyarakat.

Angka sig 0,000 membuktikan bahwa hubungan tersebut di atas dapat diterima di tingkat populasi (dengan derajat kesalahan 5% atau $\alpha=5\%$) atau dapat berlaku di tingkat populasi di ketiga kabupaten tersebut, dan bukan hanya di tingkat sampel atau sebatas di tingkat desa/gampong yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, dapat dicermati bahwa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan segenap program-program di dalamnya telah berhasil meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan cukup pesat. Salah satu hal pokok yang dilaksanakan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pembangunan ke-PU-an yang meliputi pembangunan rumah-rumah penduduk, jalan, jembatan, pengairan dan sebagainya. Di sisi lain ditunjang juga dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbentuk bantuan modal, pinjaman bergulir, dan banyak lagi.

Keberhasilan dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat pada aspek

pendidikan, yaitu dapat berlangsung kembali aktivitas pendidikan anak masyarakat pascabencana dan ketercapaian pendidikan masyarakat seiring direhabilitasi dan direkonstruksinya fasilitas jalan, jembatan dan perumahan. Aspek pekerjaan dapat dilihat dari berlangsungnya aktivitas pencarian nafkah oleh masyarakat, aspek penghasilan sudah sangat jelas dilihat dari peningkatan penghasilan masyarakat.

Hal lain yang menjadi catatan dalam penelitian ini adalah rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum usai atau baru mencapai sekitar 60% untuk perumahan, 30% untuk pembangunan jalan dan jembatan, dan lainnya 10%. Kondisi ekonomi masyarakat harus dipandang sebagai tingkat ekonomi yang juga masih akan terus berproses seiring proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

FAKTOR-FAKTOR SOSIAL YANG MENGHAMBAT PROSES PEMBANGUNAN KE-PU-AN

Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur ke-PU-an dalam upaya memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat NAD pascabencana tidak terlepas dari faktor-faktor sosial yang menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijelaskan sebagai berikut:

Kecemburuan sosial antargampong karena kualitas dan kuantitas bantuan yang berbeda-beda

Kondisi ini menyebabkan keengganan masyarakat di daerah tertentu untuk menempati rumah mereka. Mereka menganggap rumah yang diberikan tidak layak huni dan bernada menghina mereka sebagai orang Aceh. Salah satu indikator

Tabel 6. Kekuatan Hubungan Pembangunan ke-PU-an dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Directional Measures

			Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	.495	.047	9.794	.000
		Pembangunan Ke-PU-an Di Desa dan Sekitarnya (Lingkup Kab/Kota Dependent)	.458	.046	9.794	.000
		Kondisi Ekonomi Responden Saat ini Dependent	.540	.050	9.794	.000

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah semakin sedikitnya jumlah penghuni barak-barak pengungsian dan semakin banyak dari masyarakat yang sudah menempati rumah-rumah sementara maupun rumah permanen yang telah dibangun untuk mereka. Hal itu membuat pembangunan rumah-rumah bantuan dilakukan secepat mungkin untuk mengejar target dari sisi kuantitas. Imbasnya, sering kali kualitas menjadi masalah tersendiri yang muncul di lapangan. Selain kerap tidak ditempati oleh masyarakat sehingga butuh untuk diperbaiki dengan segera, kecemburuan sosial juga sering kali menjadi faktor yang memengaruhi masyarakat untuk tidak mendukung berbagai program pembangunan ke-PU-an lainnya yang akan dilaksanakan di gampong mereka. Jelas kecemburuan sosial yang berujung pada keengganan masyarakat menempati rumah-rumah bantuan menjadi penghambat kelancaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kecemburuan sosial antara penduduk setempat dengan para pendatang

Para pendatang dianggap hanya mengambil keuntungan dari gaji yang tinggi di berbagai lembaga yang menangani program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Kondisi ini mengakibatkan sikap masyarakat yang mengambil jarak dan tidak mau bekerja sama dengan pekerja NGO maupun BRR yang bertugas melaksanakan pembangunan bantuan di daerah mereka. Hal tersebut menghambat kelancaran program pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Program dan bantuan yang tidak berdasarkan basis kondisi sosial masyarakat sebelum tsunami

Keadaan demikian dapat dicontohkan, bahwa bantuan rumah tidak memperhatikan kondisi stratifikasi sosial sebelum tsunami. Alokasi bantuan yang tidak merata tersebut rentan merusak hubungan antara masyarakat penerima bantuan dengan pihak BRR, NGO, dan pemerintah daerah. Hal ini jelas menghambat kelancaran pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kepercayaan masyarakat yang semakin rendah kepada pihak-pihak tersebut juga menyebabkan segenap permasalahan, seperti warga yang tidak mau meninggalkan barak dan menempati rumah yang telah dibangun untuk mereka, warga yang menyewakan kembali rumah

mereka, termasuk warga yang memilih berkonflik terbuka dengan tidak mau menerima bantuan.

Model-model rumah yang tidak sesuai dengan adat istiadat setempat

Kondisi ini juga menghambat pembangunan ke-PU-an karena walaupun tetap menerima bantuan, masyarakat menyangkan bentuk bantuan yang tidak didiskusikan dengan mereka. Padahal menurut mereka, dimungkinkan untuk membangun rumah yang sesuai dengan nilai sosial budaya mereka walaupun dengan investasi per unit yang sama besarnya dengan jumlah yang harus dikeluarkan untuk pembangunan per unit rumah bantuan yang sekarang sudah dibangun di daerah mereka. Hal ini merupakan permasalahan yang harus segera ditangkap di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Respons masyarakat yang meragukan kinerja BRR yang notabene memiliki divisi sosial budaya sendiri merupakan kecenderungan yang buruk bagi kelangsungan program ke depannya. Apabila BRR sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan masyarakat, sulit bagi mereka untuk terus menjalankan segenap program dalam mencapai target rehabilitasi dan rekonstruksi yang digariskan.

Degradasi nilai sosial budaya yang positif di masyarakat seperti nilai kebersamaan dan gotong royong

Menurunnya budaya komunal menyebabkan restriksi (perpecahan) di masyarakat setiap bantuan diberikan. Setiap warga masyarakat mendahulukan kepentingannya masing-masing untuk mendapatkan bantuan sebanyak-banyaknya sehingga terjadi persaingan yang kurang sehat dalam memperebutkan bantuan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya bantuan yang diberikan berfungsi sebagaimana mestinya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kondisi di atas juga berujung pada sulitnya pihak-pihak pengelola program untuk mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam menyukseskan program yang dilaksanakan di daerah mereka.

Pengaruh konflik terhadap mental masyarakat dan kehidupan sosial

Konflik RI dengan GAM mewarnai Aceh sejak setengah abad lalu. Sejak diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh,

pemerintah secara serius mengatasi konflik tersebut. Seiring waktu berlalu MOU tahun 2006 kemudian menjadi titik awal kebangkitan Aceh pascakonflik berkepanjangan tersebut. Konflik juga turut memengaruhi mentalitas masyarakat Aceh. Mereka cenderung sulit bekerja sama dengan pihak luar dan hidup dalam derajat rasa was-was yang sangat tinggi. Mentalitas ini sulit dieliminasi dalam waktu singkat. Kondisi sosial budaya ini, sedikit banyak juga disebabkan oleh pengaruh konflik berkepanjangan ini. Hubungan sosial antarmasyarakat sekian lama terperangkap dalam konflik, ancaman keamanan daerah, keluarga, dan diri mereka. Kohesi sosial masyarakat yang semakin meningkat juga disinyalir merupakan pengaruh dari konflik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembangunan ke-PU-an yang telah dilaksanakan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) telah berdampak pada peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat meningkat cukup signifikan sejak awal setelah tsunami hingga saat ini. Kondisi ini secara tidak langsung membuktikan bahwa upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang di dalamnya termasuk pembangunan ke-PU-an telah berhasil mengangkat tingkat ekonomi masyarakat walaupun belum seoptimal yang diharapkan. Terdapat berbagai permasalahan sosial budaya yang menghambat pembangunan ke-PU-an. Permasalahan-permasalahan tersebut menghambat pembangunan ke-PU-an, termasuk menghambat peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Misalnya kecemburuan sosial yang tinggi antara penduduk dengan pendatang, kecemburuan sosial masyarakat antargampong karena ketimpangan kuantitas dan kualitas pembangunan ke-PU-an, pembangunan ke-PU-an (rumah) yang kurang mempertimbangkan aspek adat istiadat lokal, kurang dilibatkannya masyarakat di tingkat lokal (gampong) dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan ke-PU-an di gampong mereka.

Saran

Dalam pemulihan masyarakat pascabencana, pemerintah perlu melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) untuk memetakan

potensi sosial budaya masyarakat yang dapat dilibatkan/diaktifkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Langkah ini merupakan antisipasi terhadap segenap masalah sosial budaya yang menghambat program-program rehabilitasi dan rekonstruksi. Program pembangunan ke-PU-an disinkronisasi dengan program pengembangan ekonomi masyarakat sehingga kolaborasi antara kedua hal tersebut dapat mengoptimalkan pemulihan kehidupan masyarakat. Alternatif mengatasi masalah sosial (sosialisasi mengenai program-program secara transparan, memperkuat peran elit gampong untuk sosialisasi ke masyarakat, memperkuat peran institusi keagamaan dalam menanamkan nilai-nilai ke masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- ¹BRR. 2006. "Laporan Kemajuan Tahun 2006". Banda Aceh: BRR dan Mitra Pelaksana.
- ²Puslitbang Sebranmas. 2007. "Laporan Akhir Kajian Sosial Ekonomi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD". Jakarta: Puslitbang Sebranmas.
- ³Soelaeman, M. M. 2006. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Refika Aditama.
- ⁴Soekanto, S. 1982. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. PT. Rajawali. Jakarta
- ⁵Parelius, G.A. 1982. *Sociology*. London: Clerece dan Otto Larsen Inc.
- ⁶Babbie, E. 1995. *The Practice of Social Research*. Seventh Edition. Belmont CA: Wadsworth Publishing.
- ⁷Koentjaraningrat. 1984. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- ⁸Tan, M.G. 1993. "Masalah Perencanaan Penelitian". Dalam Koentjaraningrat (ed). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- ⁹USAID. 2006. *Data Village Planning*. Banda Aceh : USAID-Wastu Widyawan.
- ¹⁰Moleong, L.J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemardi, S. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.